

PERILAKU ELIT POLITIK ETNIS TIONGHOA PASCA REFORMASI

Juliastutik

Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang
Alamat Korespondensi: Jl. Sumbersari IA/18 Rt.01/01 Sumbersari Lowokwaru Malang
Telpon: (0341) 581907, Hp: 085855015780, E-mail:

ABSTRACT

Implementation of development is the effort to achieve national goals that is fair and prosperous society which is a constitutional mandate, every citizen has equal rights in politics and guaranteed by the Act. The reform era is marked by the collapse of the new order and dikubanya faucets democracy for citizens of ethnic Chinese are no exception, making the reform era as the era of democracy dalam berbagai aspects of life including the political field for ethnic Chinese during the New Order has received discriminatory treatment. The focus of the problem in this study, are: (1). How Tionghoa ethnic political behavior post-reform, (2). What is the process of behavior change post-reform political and ethnic Chinese (3) What are the motivations of political behavior of ethnic Chinese post-reform. The method used in this study is the method of content analysis.

The study data showed that: (1) political behavior of ethnic Chinese post-reform period is divided into 3 general election, 1999 election first ethnic Chinese still seemed awkward and shy to work directly in practical politics, much is already preparing for the day of ethnic political parties but only one party who escaped the PBI. Both the 2004 elections more than 200 people flung themselves into the ethnic Chinese candidate, both for Parliament and Parliament. From all the candidates are only a few people who managed to become a member of the House and about 30 people become members of parliament throughout Indonesia. All three of the 2009 election. political participation of ethnic Chinese over increased both in quantity and quality.

PENDAHULUAN

Semenjak Reformasi iklim demokrasi secara nasional telah membuka ruang bagi warga keturunan Tionghoa untuk berpartisipasi di bidang politik, walaupun terkesan pelan dan lambat.. Dengan keterlibatan etnis Tionghoa di panggung politik nasional akan terjadi interaksi politik antara politisi etnis Tionghoa Pribumi yang dapat menularkan etos dan mentalitas orang Tionghoa kepada sesama politisi, dimana prinsip dagang yang mengedepankan rasa saling percaya dan efisiensi diharapkan dapat membangun keterwakilan yang tulus, tidak semu antara rakyat dan wakilnya di parlemen. Kebijakan publikpun diharapkan berpihak pada rakyat banyak.

Mustofa Liem (2009) seorang dewan penasehat jaringan Tionghoa untuk kesetaraan mengemukakan bahwa : “Politik kekuasaan atau kepartaian dengan menjadi caleg, sebenarnya merupakan lahan kecil saja bagi warga Tionghoa. Pernyataan Amin Rais (dalam

Mustofa Liem:2009) mengemukakan bahwa “sebenarnya terlalu sempit jika kalangan etnis Tionghoa hanya bermain di wilayah politik kepartaian saja”.

Tujuan dari perjuangan politik partai adalah meraih posisi atau kekuasaan lewat kursi legislatif atau kursi nomor satu di negeri ini. Sedangkan wilayah gerak politik kenegaraan mengatasi kerja politik partai. Politik kenegaraan bertujuan mengupayakan kebaikan bersama semua warga negara tanpa kecuali. Selanjutnya menurut Mustofa Liem mengemukakan bahwa “ ikut memilih /berpartisipasi dalam Pemilu bagi etnis Tionghoa mempunyai makna signifikan”. Seperti diketahui ada perbedaan antar politik kenegaraan mengatasi kerja politik partai. Politik kenegaraan (*state politics*) dan politik kenegaraan (*state politics*). Keterlibatan aktif dalam politik kepartaian merupakan realisasi dari politik kekuasaan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi. Alasan dipergunakannya metode ini, adalah dengan pertimbangan bahwa hasil penelitian ini akan memperoleh suatu hasil atau pemahaman terhadap berbagai isi pesan yang disampaikan oleh media masa massa atau sumber informasi yang lain secara obyektif dan sistematis. Menurut Kirlinger (dalam Rahmat Kriyantono;2008:230)

Analisis isi merupakan suatu metode untuk mempelajari dan menganalisis komunikasi secara sistematis, obyektif, terhadap pesan yang tampak. Terdapat tiga aspek penting, (1) analisis terhadap rekaman verbal, (2) pemahaman kualitatif yang dikumpulkan dalam bentuk jawaban atas pertanyaan terbuka, respon verbal terhadap tes, maksudnya memungkinkan peneliti memanfaatkan daya yang dikumpulkan dengan cara tidak terlalu membatasi pokok bahasan dan dapat menguji kesahihan data dengan berbagai teknik yang berbeda. (3) menyangkut proses komunikasi dimana isi merupakan bagian integralnya. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka penelitian ini pemahaman kualitatif yang dikumpulkan dari berbagai dokumen dalam literatur, hasil penelitian, makalah diskusi/seminar dan *browsing* melalui internet serta media lainnya seperti surat kabar (koran) maupun media cetak lainnya. Dimana sumber yang dipergunakan dalam penelitian ini mempunyai relevansi dan akurasi data dengan rumusan masalah yang ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perilaku Politik Etnis Tionghoa Pasca Reformasi

Era reformasi telah berhasil membukakan pintu yang sangat lebar bagi etnis Tionghoa di Indonesia untuk lebih leluasa menyatakan identitas etnisnya. Fenomena partisipasi politik di Kalimantan Barat, seperti yang disampaikan oleh Eka Hendry.Ar, sebagai berikut :

"Etnis ini menyelenggarakan Imlek dan berbagai perayaan lain dalam skala besar yang secara menyolok memperagakan "barongsay dan liong". Lebih dari itu era reformasi ini juga telah membukakan pintu yang lebar bagi etnis Tionghoa untuk terjun ke bidang Politik. Bersama Dayak, etnis

Tionghoa ini beraliansi mendirikan suatu partai politik dan hasilnya adalah terpilihnya beberapa politisi Tionghoa sebagai anggota DPRD, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten. Selain itu melalui bergaining tingkat tinggi, etnis Tionghoa ini juga berhasil menempatkan wakilnya dalam MPR RI. Dan dengan memanfaatkan konflik politik antara Dayak dan Melayu di satu pihak dan konflik politik internal dalam Dayak itu sendiri. Pada akhir tahun 2003 Tionghoa ini juga berhasil menjadi bupati di Sangau"

Geliat itu tidak terlepas dari kebijakan pemerintah pasca Reformasi yang lebih memberikan ruang bagi etnis Tionghoa untuk embali dapat menikmati hak 13 hak mendasarnya sebagai warga negara Indonesia. Menurut Prof.Dr. Jimmly As Siddiqi, bahwa :

"Orang-orang 'Cina' peranakan yang tinggal menetap turun menurun di Indonesia, sejak masa reformasi sekarang ini, telah berhasil memperjuangkan agar tidak lagi disebut sebagai orang 'Cina' melainkan disebut sebagai orang Tionghoa".

Disamping itu, karena alasan hak azasi manusia dan sikap nondiskriminasi, sejak masa pemerintahan B.J.Habibi, melalui instruksi presiden No. 26 tahun 1998 tentang penghentian penggunaan istilah pribumi dan non- pribumi, seluruh aparat pemerintah telah pula diperintahkan untuk tidak lagi menggunakan istilah pribum dan non-pribumi untuk membedakan penduduk keturunan 'Cina' dengan negarea Indonesia pada umumnya. Kalaupun ada perbedaan, maka perbedaan itu hanyalah menunjuk pada adanya keragaman etnis saja, seperti etnis Jawa, Batak, Sunda, Arab, Manado, Cina, dan lain sebagainya. Karena itu, status hukum dan status sosiologis golongan keturunan 'Tionghoa' di tengah masyarakat Indonesia sudah tidak perlu lagi dipersoalkan.

Namun dalam prakteknya tidak serta merta orang-orang Cina mengambil kesempatan tersebut, untuk terjun ke dunia politik praktis. Berdasarkan hasil penelitian TJ Lan (1998) setidaknya terdapat 5 model cara pandang orang Cina kaitannya dengan partisipasi politik praktis, yaitu : (1) yang merasa perlu

menonjolkan identitas etnis mereka dan memperjuangkan hak mereka sebagai golongan, misalnya dengan mendirikan partai Tionghoa, (2) mereka yang tidak mau menjadikan etnis atau agama sebagai basis gerakan, melainkan melalui platform persamaan hak, misalnya dengan mendirikan partai Bhinneka Tunggal Ika, (3) kelompok yang lebih menyukai sebuah forum yang tujuan utamanya lebih sebagai *pressure group*, (4) mereka yang membentuk paguyuban kelompok karena perasaan senasib sepenangungan, misalnya dengan mendirikan paguyuban sosial marga "Tionghoa Indonesia" dan (5) mereka yang bergabung dalam partai politik yang terbuka, seperti PDI-P, PAN dan lain sebagainya. Perilaku politik etnis Tionghoa dapat diklasifikasikan dalam 3 periode yaitu :

Pada Pemilu Tahun 1999

Lebih lanjut Beny mengemukakan sebagai berikut :

"Dalam Pemilu 1999, masyarakat Tionghoa sudah tidak lagi bersikap skeptis dan bingung dalam memilih. Pada pemilu 1999 mayoritas etnis Tionghoa mempercayakan aspirasi politiknya kepada Partai Demokrasi Indonesia, PDI-Perjuangan, meskipun sebenarnya pada pemilu tersebut sudah ada partai yang berbasis Tionghoa sendiri, yakni Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia (PBI) yang dipimpin oleh Nurdin Purnomo". Bukti bahwa PBI tidak atau belum "mengakar" di kalangan etnis Tionghoa adalah : PBI ternyata hanya memperoleh 1 kursi di DPRD Prop. Kalimantan Barat. Pilihan untuk memilih PDIP karena ada kesadaran bahwa mereka (etnis Tionghoa dan PDI-P) sama-sama mengalami penindasan pada era Orde Baru".

Berkaitan dengan intensitas partisipasi elit politik etnis Tionghoa, Iskandar Yusuf, mengemukakan sebagai berikut :

"Intensitas partisipasi politik etnis Tionghoa di Indonesia berbeda-beda dari waktu ke waktu, bergantung pada situasi dan kondisi, sikap pemerintah dan masyarakat. Sebelum

perang Dunia ke-II, orientasi politik etnis Tionghoa di zaman Hindia Belanda hanya kepada negeri leluhur Tiongkok. Hal ini terjadi, karena pada waktu itu, etnis Tionghoa masih menganggap dirinya sebagai penduduk sementara Hindia Belanda (Hwa Chiao), Sementara pemerintah Hindia Belanda menganggap mereka sebagai Nederlandsch Onderdaan (Kaula Negara Belanda), bukan warga negara Belanda. Jadi mereka adalah warga negara Tiongkok. Karena mereka bangsa Tionghoa, maka mereka menghimpun banyak dana untuk membantu republik Tiongkok berperang melawan Jepang. Setelah pemerintahan Hindia Belanda takluk dan Jepang menguasai Hindia Belanda, banyak diantara mereka ditangkap dan dipenjarakan oleh pemerintah penjajah Jepang"

Perjalanan etnis Tionghoa dalam percaturan politik di tanah air penuh dengan dinamika yang memposisikan etnis tersebut alergi dengan kata "politik", namun sejak reformasi tepatnya setelah Presiden RI dijabat oleh Abdurrahman Wahid dengan berbagai kebijakan melontarkan gagasan perlunya dibentuk Komite Rekonsiliasi Nasional. Warga negara Indonesia yang selama ini akibat politik represif Orde Baru terpaksa terdampar dan bermukim di luar negeri agar dapat diizinkan kembali ke Tanah Air dengan memberikan paspor RI yang baru. Demikian juga ia mengusulkan agar Tap N0 XXV/MPRS/1966 tentang pelarangan PKI dan paham yang berbau Marxisme/Leninisme dicabut.

Sikap eksklusif, apatis dan isolatif masyarakat etnik Tionghoa di bidang politik juga secara perlahan mulai terkikis. Etnis Tionghoa mulai merambah dunia politik.

Pada awal reformasi tampaknya sebagian besar suara etnis Tionghoa tersebut diberikan kepada PDI-P di bawah pimpinan Megawati Soekarnoputri. PDI-P yang ketika itu dianggap selain partai "sandal jepit" yang mewakili *wong cilik* juga partai alternatif. Apalagi di bawah pimpinan Megawati yang adalah puteri Bung Karno, diharapkan dapat membawa aspirasi kedua kelompok yang selama masa rezim Orde Baru secara politis selalu disisihkan. Bahkan di berbagai kantong

etnis Tionghoa di Jakarta perolehan suara PDI-P ada yang sampai 95%. Memang sebagian suara ada yang diberikan kepada partai-partai lainnya, antara lain partai yang “berbau Tionghoa” -Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia (PBI) di bawah pimpinan Nurdin Purnomo alias Wu Nengbin, PAN, PKB dan Golkar. PBI berhasil meraih suara yang cukup berarti di Sumatera Utara, Riau dan Kalimantan Barat. Sementara di Jawa Tengah dan Yogyakarta PAN berhasil mendapatkan sebagian suara etnis Tionghoa di samping PKB di Jawa Timur.

Partisipasi elit politik etnis Tionghoa secara nyata dan terbuka dapat dilihat pada perilaku atau aktivitas elit politik etnis ini setelah tumbangnya orde baru, yaitu era reformasi, dimana pada masa ini ditandai dengan dibukanya kran demokrasi secara luas membawa implikasi bagi warga negara etnis Tionghoa di Indonesia untuk berpartisipasi dalam bidang politik.

”Diawali pada Pemilu 1999, dimana perilaku elit politik etnis Tionghoa pada saat ini terkesan agak canggung” (Beny G. Setiono). Sebenarnya perilaku elit politik etnis Tionghoa telah mengalami beberapa tahap.

Pada tahap sebelum pemilu, telah terbentuk beberapa partai baru yang secara terbuka menyatakan akan memperjuangkan aspirasi etnis Tionghoa. Partai-partai itu adalah Partai Reformasi Tionghoa Indonesia, Partai Bhinneka Tunggal Ika, Partai Pembaharuan Indonesia dan Partai Warga Baru Indonesia. Berdirinya partai-partai baru ini dihadapkan pada kondisi obyektif masyarakat keturunan Tionghoa yang masih mengambil jarak cukup jauh dari politik praktis. Kemunculan partai-partai yang membawa nama Tionghoa dinilai hanya akan membawa kerugian secara politik, dan dikhawatirkan memancing resksi antipati di kalangan masyarakat luas (Iskandar Yusuf : 2009).

Kondisi obyektif menunjukkan sebagai besar etnis Tionghoa masih alergi dengan bentuk-bentuk partisipasi politik, akhirnya semua partai yang bernuansa etnis tersebut gagal.

Kemudian Presiden Wahid mengeluarkan Inpres yang melikuidasi seluruh larangan perayaan/ritual adat-istiadat/tradisi, agama dan kepercayaan etnis Tionghoa

secara terbuka yang telah berlaku selama hampir 35 tahun. Demikian juga larangan impor/peredaran barang cetakan dalam aksara Tionghoa turut dilikuidasi. Tahun Baru Imlek dijadikan hari libur fakultatif. Sudah tentu kebijakan ini mendapatkan sambutan gegap gempita dari etnis Tionghoa yang merasa selama ini menjadi warga negara kelas dua (Arief Budiman dalam Justian Duhandinata;2009:292). Selanjutnya Arief mempertegas bahwa :

“Sudah saatnya WNI keturunan Tionghoa untuk menjadi aktivis atau tokoh politik yang punya keberanian untuk mengkritik pemimpin nasional, meskipun resikonya kaan diperjara. “Dengan melakukan hal itu akan membuat warga keturunan Tionghoa Indonesia menganggap diri mereka sebagai orang Indonesia yang mempunyai hak sama dan menanggung resiko sama seperti orang Indonesia lainnya di seluruh Negeri, karena Etnis Tionghoa selama ini difahami sebagai masyarakat yang berpikiran bisnis dan jauh dari ranah politik”.

Arief juga menegaskan bahwa ada sinyal yang baik sehubungan dengan idu – komunitas Tionghoa di Indonesia, khususnya setelah gerakan reformasi, yang dimulai beberapa tahun lalu. “Sungguh melegakan melihat bahwa Kwik Kian Gie terlibat aktif dalam partai politik dan tidak terjadi hal-hal yang tak mengenakkan terhadap dirinya”

Bahkan pada masa kampanye pemilu tersebut, untuk menarik simpati etnis Tionghoa, atraksi *barongsai* dan *liong* yang resminya masih dilarang turut ditampilkan antara lain oleh PAN, PDI-P, PKB dan Partai Golkar. Menyambut Tahun Baru Imlek, spanduk-spanduk partai politik bertuliskan Kalimantan Barat.

Selama ini ada pemikiran sebagian etnis Tionghoa bahwa untuk memperjuangkan aspirasinya, etnis Tionghoa tidak dapat menggantungkan diri kepada partai-partai lain. Etnis Tionghoa harus mempunyai partainya sendiri.

Menjelang Pemilu 1999, ada 3 parpol yang didirikan oleh sekelompok etnis Tionghoa, yaitu Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia (PBI) di bawah pimpinan Nurdin Purnomo- pengusaha Travel dan Ketua Yayasan Hakka-, Partai Reformasi Tionghoa

Indonesia (PARTI) di bawah pimpinan Lieus Sungkharisma - bendahara KNPI- dan Partai Pembauran Indonesia di bawah pimpinan Jusuf Hamka -pengusaha HPH dan tokoh Bakom-PKB. Namun Partai Pembauran Indonesia ternyata tidak mendapatkan sambutan dan gugur sebelum berkembang. PARTI gagal mengikuti seleksi KPU dan tidak turut berpartisipasi dalam Pemilu 1999. Hanya PBI yang turut dalam Pemilu dan wakil dari Kalimantan Barat, L.T. Susanto berhasil terpilih menjadi satu-satunya anggota DPR dari PBI.

Dari ketiga partai tersebut kita sudah dapat membayangkan bahwa ternyata pandangan politik etnis Tionghoa tidak homogen. Etnis Tionghoa yang selama ini dipandang homogen ternyata sangat heterogen. Etnis Tionghoa bukan hanya dipisahkan oleh unsur “totok” dan “peranakan”, tetapi juga oleh asal-usul di daratan Tiongkok (Hokkian, Hakka, Kongfu dsbnya), dengan segala ciri dan stigmanya. Belum lagi dari segi agama, ada yang beragama Khonghucu, Tao, Buddha, Kristen, Katolik bahkan Islam. Ada lagi pembagian Tionghoa Medan, Tionghoa Padang, Tionghoa Bangka, Tionghoa Pontianak, Tionghoa Jawa, Tionghoa Makassar, Tionghoa Manado dsbnya, juga dengan segala predikat dan stigmanya. Sebagian ada yang berorientasi ke daratan Tiongkok dan ada yang ke Taiwan. Ada kelompok yang prointegrasi dan ada yang proasimilasi (kini dengan baju pembauran). Ada yang pro-Orde Baru dan militer (para konglomerat dan pengusaha papan atas), sebaliknya ada yang pro-reformasi yang pada umumnya kelas menengah ke bawah.

Perpecahan yang timbul, ternyata bukan saja terjadi di kalangan elite partai-partai politik nasional, tetapi juga di kalangan etnis Tionghoa. Setelah ada Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) di bawah pimpinan Brigjen (Pur) Tedy Jusuf (Xiong Deyi) muncul Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) di bawah pimpinan Drs Eddie Lembong (Wang Youshan). Demikian juga sekarang ini ada 3 organisasi suku Hakka, masing-masing di bawah pimpinan Nurdin Purnomo, Yang Kheling dan Oei Tek Sin (Teddy Sugianto). PBI pecah masing-masing di bawah pimpinan Nurdin Purnomo dan Frans Tsai/L.T. Susanto. Seperti juga yang dialami bangsa ini, akibat kebijakan Presiden Soeharto ketika berkuasa, yang menekan setiap tokoh yang dianggap potensial menjadi pesaing dan membahayakan kedudukannya, di

kalangan etnis Tionghoa terjadi krisis tokoh yang handal dan berintegritas, yang dapat mempersatukan seluruh etnis Tionghoa. Sampai saat ini tidak seorangpun tokoh Tionghoa yang dapat diterima oleh seluruh lapisan dan golongan etnis Tionghoa sebagai calon pemimpinnya.

Setelah th 1999, iklim politik etnis Tionghoa untuk berpartisipasi dan berperilaku dalam politik lebih kondusif.

Pada Pemilu Tahun 2004

Pemilu 2004 terjadi perubahan dalam sikap dan pendirian politik masyarakat Tionghoa. Mereka dinilai cenderung skeptis terhadap trend multi partai dan kemudian cenderung memilih golput sebagai pilihan politiknya’

*Berdasarkan data yang diungkapkan oleh Christin Susanna Thjin (seorang Peneliti CSIS), bahwa dalam pemilu 2004 dinamika etnis Tionghoa semakin dinamis dan asertif, walaupun sebagian masyarakat (terutama di kalangan elit politik) tampak masih nyaman dengan stigma 2 % - 70% (baca 2% pemilih, tapi menguasai 70% ekonomi dalam negeri). Akibatnya partisipasi politik masyarakat Tionghoa dinilai sebagai **partisipasi celengan**. Disamping itu pada pemilu 2004 tidak ada satupun partai politik bernuansa Tionghoa yang berhasil lolos verifikasi untuk dapat mengikuti Pemilu dalam Eka Hendrik Ar (2010)*

Dalam Pemilu Legislatif tahun 2004 tidak satupun partai politik berbasis Tionghoa yang berhasil lolos seleksi, baik di Dep. Kehakiman dan HAM maupun KPU. Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia (PBI) nya Frans Tsai tidak lolos seleksi Departemen Kehakiman dan HAM dan PBI nya Nurdin Purnomo tidak lolos seleksi KPU. Masih ada satu partai politik lainnya yang dipimpin oleh seorang etnis Tionghoa dan juga mengandalkan dukungan dari kalangan etnis Tionghoa sendiri yaitu Partai Demokrasi Perjuangan Rakyat (PDPR) pimpinan Handokoyang juga gagal mengikuti pemilu karena tidak lolos seleksi KPU. Tetapi dengan gesit dan lincahnya beberapa pemimpin parpol tersebut segera bermigrasi dan menjadi caleg (calon legislatif) partai politik lainnya. Nurdin Purnomo

menjadi caleg PNI Marhaenis dan Frans Tsai menjadi caleg Partai Demokrat. Ironisnya keduanya pun gagal menjadi anggota DPR (Beny.G.Setiono).

Trend geliat partisipasi politik etnis Tionghoa sebenarnya terus bergerak dinamis di beberapa wilayah di Indonesia. Salah satunya adalah fenomena partisipasi politik etnis ini di Makasar.

Dalam pemilu 2004, lebih dari dua ratus orang etnis Tionghoa menerjunkan diri menjadi caleg, baik untuk DPR maupun DPRD. Namun pada umumnya mereka hanya digunakan oleh berbagai partai politik terutama partaipartai gurem untuk menghimpun suara dan dana. Mereka hampir semuanya ditempatkan di posisi nomor sepatu. Para caleg Tionghoa ini kebanyakan adalah para pengusaha golongan menengah yang sangat naif dalam persoalan politik dan belum siap untuk terjun ke kancah politik praktis. Dari seluruh caleg tersebut hanya beberapa orang saja yang berhasil menjadi anggota DPR dan sekitar tigapuluh orang menjadi anggota DPRD di seluruh Indonesia. Kemana suara etnis Tionghoa disalurkan pada Pemilu Legislatif 2004. Pada umumnya suara mereka disalurkan kepada PDS, Partai Demokrat, Partai Golkar, PDIP, PKB, dan PIB. (Beny G. Setiono; 2008)

Dr Muhammad Darwis, seorang sosiolog dari Universitas Hasanudin bahwa :

”Minat dan kesadaran politik etnis Tionghoa semakin tumbuh. Hal ini bisa menjadi pembelajaran yang baik bagi politisi lain untuk memperbaiki Citra. Ia mencontohkan kasus di Makasar, dimana etnis Tionghoa mulai turun ke dunia politik, terutama mereka dari kalangan yang mapan dari segi ekonomi”

Pendapat tersebut di atas diperkuat dengan hasil penelitian Asdar tentang partisipasi etnis Tionghoa di Makasar, dalam disertasinya yang berjudul ”Keran Reformasi Ubah Perilaku Politik Masyarakat Etnis Tionghoa ” sebagai berikut :

Di Makasar, masyarakat etnis Tionghoa tidak ketinggalan melibatkan diri dalam berpolitik. Arwan Tjahyadi, menjadi pelopor dan satu-satunya wakil masyarakat etnis Tionghoa yang memberanikan diri maju pada Pemilu 1999 melalui Partai Kedilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan berhasil menjadi anggota DPRD Kota Makasar. Langkah Awan Tjahyadi tersebut telah membuka mata etnis Tionghoa lainnya, sehingga pada pemilu th 2004 ada 12 orang elit politik etnis Tionghoa yang maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) meskipun kemudian hanya satu yang terpilih”

Dari beberapa temuan data tersebut di atas nampak jelas bahwa pemilu th 1999 merupakan tonggak baru sebagai pintu pembuka bagi etnis Tionghoa untuk menyalurkan aspirasinya di bidang politik, sekaligus merupakan keterlibatannya dalam berperilaku di bidang politik

Pada Pemilu Tahun 2009

Pemilhan Umum (Pemilu) tahun 2009 merupakan tonggak baru bagi etnis Tionghoa di Indonesia, bukan hanya sebagai partisipan yang memainkan peran sebagai pemilih saja atau sekedar menjalankan kewajiban sebagai warga negara, melainkan besarnya animo etnis Tionghoa untuk menduduki jabatan sebagai calon legislatif (caleg) atau berperan aktif dalam partai politik. Fenomena ini menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran berpolitik dari warga negara juga semakin adanya kesetaraan antara warga Tionghoa dengan masyarakat yang lain di negeri ini Beny.G. Setiono, mengemukakan bahwa :

“Etnis Tionghoa dapat berkiprah dalam dunia politik untuk ikut menyumbangkan tenaga dan pikirannya dalam membangun bangsa dan negara dengan memasuki partai-partai politik yang sesuai dengan pilihannya, atau dengan mendirikan partai politik baru bersama komponen bangsa lainnya yang mempunyai visi dan misi yang sama, yang mempunyai program atau platform yang jelas dan kecenderungan etnis Tionghoa memilih berpartisipasi dalam partai politik yang

anggotanya bersifat multikulturalisme, sehingga partai tersebut dapat tumbuh menjadi besar dan berakar di masyarakat. Sekarang ini terbuka kesempatan bagi etnis Tionghoa untuk terjun di dunia politik dan mencalonkan diri baik untuk menjadi anggota DPR maupun DPD.”

Ada beberapa orang etnis Tionghoa yang berhasil menjadi anggota DPR, MPR dan DPRD. Di DPR ada Kwik Kian Gie (kemudian diganti karena diangkat menjadi menteri) dan Ir Tjiandra Wijaya Wong dari PDI-P, Alvin Lie Ling Piao dari PAN, Ir Enggartiasto Lukita dari Golkar dan LT Susanto dari PBI. Di MPR ada Hartati Murdaya Poo (Chow Lie Ing) dari Walubi yang mewakili Utusan Golongan dan Daniel Budi Setiawan yang menjadi wakil Utusan Daerah Jawa Tengah dari PDI-P. Kemudian di level DPRD Prop. Kalimantan Barat ada beberapa etnis Tionghoa seperti : Ir. Adreas Acui Simanjaya, Setyawan Liem, SH, Kenny Kumala (DPRD Kalbar), Michael Yan (DPRD Kalbar), puncaknya adalah pilgub Kalbar dimana Christiandy Sanjaya berhasil merbut kursi Wakil Gubernur Kalimantan Barat mendampingi Coenellis.

Perilaku/sikap keterbukaan elit politik etnis Tionghoa maupun masyarakat etnis Tionghoa pada umumnya semakin jelas pada perhelatan Pilkada Sulawesi Selatan, tepatnya di Makasar pada th 2007. Selain menyalurkan hak pilih, beberapa diantara mereka juga menjadi tim sukses salah satu kandidat, aktif memantau Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta menjadi petugas KPPS dan TPS.

Namun demikian, keterlibatan masyarakat etnis Tionghoa dalam politik praktis masih terbatas pada figur muda, semestara para sesepuh dan orang tua dari etnis Tionghoa ini masih terkesan apatis akibat trauma yang berkepanjangan dan perlakuan diskriminatif pada masa pemerintahan Orde Baru. (Asdar, 2010).

Sehubungan dengan itu Eka Hendry, R, mengemukakan bahwa :

” Berdasarkan pada fenomena pemilu terakhir (1999 dan 2004) dan proses politik ditingkat lokal di Kalimantan Barat (kalbar) dalam pilkada. Berdasarkan momentum tersebut memperlihatkan bahwa geliat politik

etnis Tionghoa mulai tampak. Jika pada pemilu 1999, komunitas Tionghoa terlihat agak malu-lamu dan canggung untuk terjun langsung ke dunia politik, maka pada pemilu 2009 sudah menampakkan perubahan perilaku yang signifikan di bidang politik walaupun diakui terkesan lambat ”

Pendapat tersebut di atas diperkuat oleh Lisa Suroso, yang mengemukakan bahwa

”Pada pemilu 2004 dan Pilkada di Kalimantan Barat (pada tahun 2007- 2008). Di kalangan elit politik Indonesia (yang didominasi oleh non Tionghoa) pada Pemilu 2004 belum menganggap bahwa kalangan etnis Tionghoa sebagai ”ancaman politik” yang berarti, berbeda dengan pemilu th 2009. Karena dalam pikiran sebagian besar elit politik, Tionghoa masih identik dengan kegiatan dan kepentingan ekonomi semata, sehingga mereka dinilai apolitik”

R. Ferdian Andi, R :2009 dalam ”Bangkitnya Kesadaran Politik Tionghoa” menjelaskan bahwa Imlek th 2009 yang menurutnya cukup spesial, karena lebih sewindu warga Tionghoa hidup bebas di Indonesia, dengan dicabutnya Inpres no. 14/1967. Imlek tahun 2009 bersamaan dengan tahun politik yaitu pemilu 2009.

Menurutnya partisipasi politik etnis Tionghoa dapat disajikan sebagai berikut : Peran serta warga Tionghoa dalam pemilihan legislatif pada april 2009 baik untuk caleg di tingkat pusat, Tingkat I dan II) terdapat 213 caleg Tionghoa dari total caleg 11.000 yang tersebar di 38 Propinsi seluruh Indonesia, bahkan di jalan-jalan besar foto-foto calon anggota caleg dari etnis Tionghoa ini sudah akrab dengan publik.

Sehubungan dengan itu Benny, G. Detiono mengemukakan bahwa :

Jika pada pemilu 2004 partisipasi politik etnis Tionghoa semakin dinamis dan asertif, apalagi pemilu th 2009. Generasi muda etnis Tionghoa mulai bergairah, percaya diri di bidang politik muncul, pilihan harus dibuat dan tindakan harus diambil untuk memaknai

eksistensi etnis Tionghoa di Indonesia. Partai politik berlomba "menjual" ke publik untuk dapat meraih suara dari masyarakat etnis Tionghoa ini. Sementara masyarakat etnis Tionghoa lebih suka memilih partai politik yang memiliki calon-calon dari multi-etnis. Dengan masuk ke dunia politik secara aktif, etnis Tionghoa sebagai bagian dari warga negara dapat memberikan kontribusi ke pada negara Indonesia.

Daniel Johan, menegaskan bahwa "Pemilu 2009 menjadi kebangkitan etnis Tionghoa dalam keterlibatannya di politik praktis. Menurut dia saat ini ada sekitar 100 calon legislatif tingkat DPR RI dari etnis Tionghoa. Kendati demikian ia berharap bahwa kedepan politik simbol harus bergeser menjadi politik substantif yang mengedepankan program dan visi misi untuk rakyat Indonesia. Menurutnya saat ini masih simbol, baik etnis maupun agama. Kedepannya harus berubah menjadi politik substantif yang mengedepankan program kerja untuk rakyat" (dalam Adi Jaya, 2009)

Daniel berharap bahwa masyarakat Etnis Tionghoa dapat memanfaatkan Pemilu 2009 sebagai pintu masuk untuk regenerasi tulang punggung politik etnis Tionghoa. "Setiap pribumi Tionghoa harus menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya, karena masa-masa diskriminasi telah berakhir. Karena naga-naga pribumi bersama anak bangsa yang lain bisa bersama-sama memberikan kontribusi terbaiknya untuk kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia. Pernyataan Daniel Johan ini tampaknya juga diakui oleh Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Khong Hu Cu Indonesia (MATAKIN), Budi.S. Tanuwibowo.sebagai berikut :

"Sejak dibukanya kran demokrasi melalui reformasi pertengahan th 1997 lalu, hanya warga etnia Tionghoa saja yang baru tampil ke panggung politi untuk berpartisipasi dalam politik praktis. Mungkin soal kemampuan, memang belum. Ini saya kira proses biasa saja, Saya optimis lambat laun kualitas dan politisi Etnis Tionghoa bakal meningkat seiring dengan proses seleksi alam

kuantitas masyarakat etnis Tionghoa di Indonesia, hingga kini telah mencapai 8 – 10% dari total penduduk Indonesia . Angka ini jelas memiliki arti signifikansidalam turut serta berpartisipasi di bidang politik, khususnya dalam pemilu th 1009"

Pendapat tersebut di atas menunjukkan bahwa etnis Tionghoa sebagai bagian dari warga negara Indonesia secara hukum memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya, dengan dibukanya kran demokrasi oleh pemimpin negara telah membukakan pintu demokrasi begi etnis Tionghoa yang selama pemerintahan Orde Baru telah mengalami diskriminasi yang cukup memprihatinkan. Dengan dibukanya pintu demokrasi tersebut sekaligus memberikan peluang semaksimal mungkin bagi etnis Tionghoa ini untuk melibatkan diri dalam percaturan politik nasional.

Proses Perubahan Perilaku Elit Politik Etnis Tionghoa Pasca Reformasi

Perlakuan diskriminatif politik dan budaya yang diberlakukan pada masa pemerintahan Orde Baru seperti adanya peraturan ganti nama yang diatur dalam Keputusan Presidium Kabinet N0.127/U/Kep/12/1966, Inpres No.14/1967 yang mengatur perayaan keagamaan/tradisi yang membatasi hanya di lingkungan sendiri (bukan tempat umum), pengenalan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia(SKBRI), pemberian kode khusus pada KTP, belum lagi deraan berupa trauma politik yang dialami oleh etnis Tionghoa di masa Orde Baru bahkan di buat satu Badan Intelegen yang khusus bertugas mengawasi Masalah Tionghoa, yaitu Badan Koordinasi Masalah Cina (BKMC), suatu penamaan yang mengesankan bahwa kedatangan Tionghoa di Indonesia merupakan masalah.

Hal ini menimbulkan sikap eksklusif, apatis dan isolatif bagi etnis Tionghoa dalam dunia politik. Pembahasan dan analisa tentang perubahan perilaku elit politik etnis

Tionghoa ini tidak dapat lepas dari partisipasi elit politik etnis Tionghoa di Indonesia

Sebetulnya partisipasi atau bentuk perilaku keterlibatan etnis Tionghoa dalam bidang politik telah

dijalankan jauh sebelum Indonesai merdeka, yaitu sejak kedatangan Laksamana Cheng Ho di tanah Jawa pada tahun 1405. Sebelum sampai di Jawa Cheng Ho terlebih dahulu singgah di Samudra Pasai menemui Sultas Zaenal Abidin Bahian Syah untuk membuka hubungan politik dan perdagangan, termasuk juga penyebaran agama Islam di Jawa. Benny.G.Setiono dalam bukunya "Tionghoa dalam Pusaran Politik" mengemukakan bahwa ada pendapat yang mengatakan bahwa beberapa orang walisongo adalah dari etnis Tionghoa, diantaranya adalah Sunan Ngampel yang nama aslinya Bong Swi Hoo alias Raden Rachmat yang dari hasil perkawinannya dikarunia putera yang diberi nama Bong Ang yang kemudian lebih dikenal dengan Sunan Bonang, juga Sunan Kali Jaga atau Raden Said 9nama aslinya Gan Si Cang, serta Raden Patah yang dikenal sebagai Sultan Demak (Bintoro) pertama yang merupakan kesultanan Islam pertama di Jawa sebenarnya adalah bernama asli Jin Bun anak dari Kung Ta Bu Mi (Kertabumi) atau Prabu Brawijaya V, Raja Majapahit terakhir yang menikah dengan putri Cina anak pedagang Tionghoa.

Partisipasi politik etnis Tionghoa, secara nyata sebenarnya dimulai sejak presiden pertama Ir. Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) pada tahun 1926, walaupun saat itu partisipasinya hanya sebagai pengamat saja. Kemudian mengalami perkembangan, dimana kelompok peranakan Tionghoa mendukung Indonesia merdeka dengan membentuk Partai Tionghoa Indonesia (PTI) pada tahun 1930. Ketika orde lama digantikan dengan orde baru bentuk partisipasi etnis ini sangat dibatasi, yang akhirnya etnis ini lebih dominan pada kancah ekonomi, dan seakan "tabu" untuk menggeluti dunia politik sampai akhir kebuntuan itu pecah pada 14 Mei 1998 ketika kerusuhan melanda Jakarta.

Setelah orde baru runtuh dan digantikan dengan era reformasi, tepatnya pada Pemilu 1999 membawa fenomena baru perilaku politik etnis Tionghoa. Tahapan sebelum pemilu, terbentuk beberapa partai baru yang secara terbuka menyatakan akan memperjuangkan aspirasi etnis Tionghoa. Setelah 1999, iklim politik bagi etnis Tionghoa dalam politik lebih kondusif, berlanjut pada pemilu 2004 yang mana ketika pemilu Legislatif, setidaknya lebih dari 100 calon legislatif etnis Tionghoa tersebar di beberapa partai politik (Revli Mandagie:2009)

Partai-partai politik yang secara primordial dan menggantungkan diri kepada basis Tionghoa **pasti** mengalami kegagalan. PARTI pada pemilu 1999 justru tidak mendaftarkan diri untuk mengikuti Pemilu th 1999, Pada Pemilu tersebut hanya PBI yang berhasil lolos seleksi, namun hanya memperoleh sebuah kursi di parlemen untuk wilayah Kalimantan Barat (L.T.Susanto). Dalam pemilu 1999 suara etnis Tionghoa pada umumnya disalurkan kepada PDIP, PKB, PAN dan Partai Golkar. Pada Pemilu 2004 tidak satupun partai politik yang bernuansa Tionghoa berhasil lolos seleksi dan ikut dalam Pemilu.

Etnis Tionghoa melalui Perhimpunan INTI yang secara periodik mengadakan diskusi dan seminar politik dengan berbagai thema dan nara sumber dalam upaya meningkatkan kesadaran dan pengetahuan politik para anggota dan simpatisannya. Hasilnya menunjukkan kemajuan yang signifikan (Benny:2008). Kalau pada awalnya peserta diskusi dan seminar hanya sedikit, namun sekarang setiap event diikuti oleh ratusan orang secara tekun dan aktif. Padahal Perhimpunan INTI bukanlah sebuah organisasi Politik praktis dan melarang pengurusnya menjadi pengurus partai politik apapun. Perhimpunan INTI tidak mengikatkan diri pada kekuatan politik apapun dan berusaha untuk selalu independen. Dalam menghadapi pemilu , Perhimpunan INTI menganjurkan para anggota dan simpatisannya untuk menggunakan hati nurani dan pengetahuan politiknya untuk menentukan pilihannya.

Dalam pemilu legislatif 2004 tidak sebuahpun parpol berbasis Tionghoa berhasil lolos seleksi, baik Departemen Kehakiman & HAM maupun KPU. PBI nya Frans Tsai tidak lolos seleksi Departemen Kehakiman & HAM, sedangkan PBI nya Nurdin Purnomo tidak lolos seleksi KPU. Masih ada 1 pasrtai politik lainnya yang dipimpin oleh seorang etnis Tionghoa dan juga mengandalkan dukungan dai kalangan etnis Tinghoa yaitu Partai Demorasi Perjuangan Rakyat (PDPR) pimpinan Handoko yang juga gagal mengikuti pemilu karena tidak lolos seleksi KPU. Tetapi dengan gesit dan lincahnya beberapa peminpin parpol tersebut segera bermigrasi dan menjadi caleg tartai politik lainnya, seperti Nurdin Purnomo menjadi caleg PNI Marhaenis dan Frans Tsai menjadi caleg Partai Demokrat. Ironisnya keduanya pun gagal menjadi anggota DPR.

Demikian juga dalam pemilihan anggota DPD, tidak seorangpun wakil dari kalangan etnis Tionghoa

yang berhadil terpilih menjadi anggota DPD. Ini membuktikan bahwa memancing di kolam sendiri atau mengandalkan dukungan hanya kepada golongan tertentu saja, pasti akan mengalami kegagalan.

Menghadapi Pemilu Presiden atau Wakil Presiden, etnis Tionghoa seperti juga komponen bangsa lainnya merasa kebingungan dalam menentukan pilihannya. Pada umumnya mereka merasa bahwa tidak ada sebuah pasangan pun yang cocok dan dapat mewakili asperasinya. Menurut mereka apa yang dijanjikan pada masa kampanye hanyalah janji belaka. Memang ada sekelompok orang Tionghoa yang bertujuan menjadi kroni para pengusaha yang akan datang dengan secara aktif tenjun menjadi tim sukses para capres/cawapres, tetapi mereka hanya minoritas dan tidak dapat mewakili keseluruhan etnis Tionghoa. Yang pada akhirnya kalau tidak golput yang tidak menggunakan hak pilihnya dengan benar dalam pemilu pada umumnya mereka memilih Susilo Bambang Yudhoyono yang dianggapnya dapat membawa angin baru dan segar di Indonesia (Benny:2008).

Dalam memahami partisipasi politik etnis Tionghoa, tidak dapat dipungkiri tentang keberadaan etnis ini sebagai "patron" bagi pengusaha di Indonesia. Studi Sidel dan Abinales bisa dapat dipakai untuk memahami *patronase* politik di berbagai negara berkembang, termasuk di Indonesia, seperti hipotesis yang bisa diketengahkan, sebagai berikut :

Pertama, demokrasi di Indonesia dituduh terlalu gagal karena masih terlalu prosedural. Di dalamnya, kualitas belum menjadi determinan utama karena digeser oleh pengaruh uang dan jaringan *patronase*. Betul bahwa uang adalah salah satu sumber daya penting dalam politik seperti tesis Schumpeter (1957). Namun, ketika demokrasi berubah menjadi pasar, ia tidak lagi menjadi sistem yang "adil" untuk semua, tetapi hanya "adil" bagi mereka yang bermodal. Dalam konteks inilah, politik dengan mudah dilahap oleh kaum kapitalis. Eksistensi kaum kapitalis dalam demokrasi yang mahal menjadi semakin krusial dan sentral. Ketika elite partai membangun piramida politik berdasarkan kekuatan modal. Maka, jangan pernah bermimpi menjadi calon legislatif, gubernur, atau bupati/wali kota kalau tidak mampu membayar partai miliaran rupiah. Bahkan, kalau kita perhatikan, banyak partai politik sudah diketuai oleh pengusaha, selain itu tidak dapat dipungkiri bahwa banyak para menteri dari kalangan pengusaha.

Perubahan perilaku elit politik Etnis Tionghoa maupun masyarakat etnis Tionghoa secara umum diakibatkan oleh adanya arus demokratisasi pasca Orde Baru yang mendorong motivasi etnis Tionghoa untuk aktif dalam dunia politik, termasuk motivasi untuk penguatan dunia bisnis etnis Tionghoa di Indonesia sekaligus motivasi harmonis dengan masyarakat lainnya pada umumnya.

Motivasi Partisipasi etnis Tionghoa dalam politik praktis

Era Reformasi yang ditandai dengan tumbangnya pemerintahan orde baru, iklim demokrasi secara nasional telah membuka ruang bagi warga keturunan Tionghoa untuk berpartisipasi di bidang politik, walaupun terkesan pelan dan lambat. Pada umumnya mereka yang terlibat sebagai politisi adalah mereka yang mapan dari sisi ekonomi, sehingga orientasi mereka di kancah politik bukan untuk mencari sumber ekonomi, melainkan lebih pada eksistensi, pengabdian dan pelayanan. Berbeda dengan orientasi para politisi pada umumnya yang tidak lebih mengejar akses ekonomi, kekuasaan serta fasilitas yang dibiayai dengan kas negara atau daerah. Dengan keterlibatan etnis Tionghoa di panggung politik nasional akan terjadi interaksi politik antara politisi etnis Tionghoa-Pribumi yang dapat menularkan etos dan mentalitas orang Tionghoa kepada sesama politisi, dimana prinsip dagang yang mengedepankan rasa saling percaya dan efisiensi diharapkan dapat membangun keterwakilan yang tulus, tidak semu antara rakyat dan wakilnya di parlemen. Kebijakan publikpun diharapkan berpihak pada rakyat banyak

Menurut Dr. Muhammad Darwis (dalam Lisa Suroso:2008) seorang sosiolog dari Univ. Hasanudin mengemukakan bahwa: "Ada yang menarik dari fenomena turunnya etnis Tionghoa ke dunia politik yaitu orientasi mereka di kancah politik bukan untuk mencari sumber ekonomi, tetapi lebih pada eksistensi dan pengabdian serta pelayanan". Eksistensi yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan status kewarganegaraan, yang pada hakekatnya etnis Tionghoa ini terlibat dalam politik praktis adalah semata menunjukkan bahwa etnis Tionghoa ini adalah bagian dari warga negara Indonesia yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk membela negara Indonesia baik dari ancaman dalam negeri sendiri

maupun ancaman dari luar. Pada intinya etnis Tionghoa siap bersama warga negara pada umumnya untuk membela negara kesatuan Republik Indonesia.

Mary Sommers Heidhues, mengemukakan bahwa ada satu fenomena menarik yang perlu dicatat bahwa “kecenderungan dari komunitas etnis Tionghoa adalah tidak mudah disatukan. Hal ini terjadi karena beberapa faktor seperti politik separasi oleh kaum kolonial (yang membedakan mereka dengan pribumi), ketertarikannya dengan Tiongkok dan pengalaman historis mereka di Indonesia. Berikut Pernyataan kutipan Mary Sommers Heidhues, didorong oleh pemerintah kolonial untuk berfikir bahwa mereka terpisah dari mayoritas orang Indonesia, didorong oleh Pemerintah Tiongkok, dan dipengaruhi secara historis oleh pengalaman yang berlainan, pada akhirnya komunitas-komunitas Tionghoa di Indonesia tidak pernah bisa bersatu”. Kecenderungan ini kemudian terbawa dalam konteks politik, sehingga mereka “sukar” untuk bersatu dalam satu pilihan yang sama untuk semua.

Sehubungan dengan aktivitas berpolitik elit politik etnis Tionghoa pasca reformasi yang akhir-akhir ini menunjukkan geliat trend semakin meningkat secara kualitas maupun kuantitas, Hendry Eka (2010) mengemukakan bahwa : Motivasi etnis Tionghoa berpartisipasi dalam dunia politik, tidak semata untuk merebut kekuasaan, akan tetapi lebih kepada keinginan agar bagaimana aspirasi etnis tersebut yang selama ini “dikebiri”, dapat kembali mereka peroleh. Selanjutnya ia mengemukakan bahwa ada yang berpendapat bahwa trend partisipasi politik etnis Tionghoa pada politik, tidak dimaksudkan untuk merebut kekuasaan, seperti yang mereka lakukan pada bidang ekonomi, akan tetapi lebih kepada kehendak keterwakilan dalam pemerintahan atau kekuasaan, agar mereka dapat menyalurkan aspirasi mereka dan tidak dianggap lagi sebagai kelompok *masyarakat kelas dua (the second class)*.

Hendry mempertegas pernyataannya bahwa “Meskipun ini tidak berlaku tetap, karena dalam politik omong kosong kalau orang tidak cenderung menjadi ingin berkuasa dan menguasai”. Dalam konteks Kalimantan Barat partisipasi politik etnis Tionghoa juga ditentukan oleh hubungan *patron-client*, mereka dengan militer. Sebagaimana yang sudah umum diketahui bahwa dengan kekuatan ekonomi yang dimiliki oleh etnis Tionghoa (hampir 70%) etnis

Tionghoa ini dengan mudah memiliki koneksi dengan fihak keamanan. Koneksi ini merupakan bentuk hubungan “Mualisme Simbiosis”, dimana etnis Tionghoa membutuhkan jaminan keamanan (*backing*), sementara dari kalanganonum keamanan, koneksi tersebut menjadi “ladang pendapatan sampingan” yang cukup menggiurkan karena nilainya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan pokoknya. Jadi sepanjang ada jaminan dari para petinggi keamanan bahwa kalau merek terlibat dalam politik dan kemudian mereka memenangkan proses politik (seperti Pilkada), maka mereka akan terlibat dalam proses politik tersebut, dan secara maksimal akan menggalang semua dukungan secara maksimal. Tinggal kearifan etnis Tionghoa ini saja apakah ingin berkuasa dan menguasai atau hanya sekedar hidup damai dan menyenangkan dengan komunitas lain dalam keragaman, Etnis Tionghoa jelas cukup memiliki “kemampuan” jika mereka sungguh-sungguh ingin merebut kekuasaan politik. Setidaknya karena etnis ini menguasai perekonomian di Indonesia dan mereka juga selama ini memiliki “koneksi” yang karib dengan kekuasaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan fokus masalah yang telah ditetapkan dan berdasarkan hasil data serta analisa data dapat disimpulkan sebagai berikut :

Partisipasi Elit Politik Etnis Tionghoa Pasca Reformasi , terbagi, dalam 3 periode pemilu, yaitu :

- **Pertama** : Pada Pemilu 1999. Perilaku Etnis Tionghoa ini masih terkesan canggung dan malu-malu untuk terjun langsung dalam politik praktis.
- **Kedua** : Pada pemilu 2004 Perilaku Politik Etnis Tionghoa mulai menampakkan geliat yang cukup meningkat secara kuantitas. Terdapat lebih dari 200 orang etnis Tionghoa menjadi caleg, baik untuk DPR maupun DPRD. Dari seluruh caleg tersebut hanya beberapa orang saja yang berhasil menjadi anggota DPR dan sekitar 30 orang menjadi anggota DPRD di seluruh Indonesia.

- **Ketiga** Pada Pemilu 2009. Perilaku politik etnis Tionghoa lebih meningkat baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Dalam pemilihan legislatif pada april 2009 baik untuk caleg di tingkat pusat, Tingkat I dan II terdapat 213 caleg Tionghoa dari total caleg 11.000 yang tersebar di 38 Propinsi seluruh Indonesia,

Proses Perubahan Perilaku elit politik Etnis Tionghoa Pasca Reformasi

Perilaku diskriminatif dari pemerintahan Orde Baru selama kurun waktu yang relatif panjang 32 tahun, telah menjadikan perilaku elit politik etnis Tionghoa lebih bersikap eksklusif, apatis dan isolatif. Dengan dengan kebijakan Pemerintahan presiden Abdul Rahman Wahid (Gus Dur) yang telah melikuidasi kebijakannya sekaligus menghapus diskriminasi terhadap kebudayaan etnis Tionghoa, menjadikan kran demokrasi di Indonesai untuk etnis Tionghoa ini semakin terbuka lebar. Yang pada gilirannya membawa perubahan yang cukup signifikan bagi keterlibatan etnis Tionghoa di bidang politik praktis, dari kondisi masyarakat yang malu-malu, tetapi tetap mau terlibat, yang pada akhirnya ditunjukkan dengan sikap dan perilaku yang terbuka di bidang politik dan cukup signifikan peningkatannya baik secara kuantitas maupun kualitas.

Perubahan perilaku politik ini telah mendorong motivasi etnis Tionghoa untuk terjun langsung dan aktif di bidang politik, termasuk motivasi untuk penguatan dunia bisnis dan hidup harmonis dengan masyarakat lainnya.

Motivasi Partisipasi Politik Elit Etnis Tionghoa Pasca Reformasi

Pada umumnya elit politik etnis Tionghoa yang terlibat sebagai politisi adalah mereka yang mapan dari sisi ekonomi, sehingga orientasi mereka di kancan politik bukan untuk mencari sumber ekonomi. Adapun motivasi perilaku elit Politik etnis Tionghoa ini terjun ke politik praktis adalah :

- (a). eksistensi, pengabdian dan pelayanan
- (b). kehendak keterwakilan dalam pemerintahan agar dapat menyalurkan aspirasinya dan tidak

dianggap lagi sebagai kelompok masyarakat kelas dua (*the second class*).

- (c). Sebagai penguat dunia bisnis
- (d). Menghapuskan diskriminasi dalam degala bidang baik politik, ekonomi, sosial maupun budaya, sehingga tercipta keharmonisan dalam berbangsa dan bernegara.
- (e) Mengharapkan hidup harmonis dengan masyarakat lainnya dalam wilayah Kesatuan Republik Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

Alfan Alfian.M, **Demokrasi Ekstra Liberal Pemilu 2009**, media Indonesia,

http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content=view&id=3516&Itemid=281

_____, **Demokrasi Pilihlah Aku**, media Indoonesia, <http://www.Ahmadheryawan.com/opini-media/sosial-politik/691-demokrasi-pilihlah-aku.ht>

Benny G. Setiono, **Tionghoa Dalam Pusaran Politik**, Pen. ELKASA Jakarta

_____, Sastra Pembebasan : **Partisipasi Politik, Sosial, dan Ekonomi Etnis Tionghoa di Era Reformasi** , Bagian ke-1 Media Indonesia, <http://old.nable.com/-sastra-pembebasan-Fw:-PARTISIPASI—POLITIK,-SOSIAL—DA> (diakses 3 Mei 2009) Makalah disampaikan dalam Seminar Refleksi 10 Tahun Tragedi Mei 2008 diselenggarakan oleh CSIS dan FIB Univ. Indonesia, Jakarta 3 Mei 2008

_____,Partisipasi Politik, Sosial, Ekonomi Etnis Tionghoa **Indonesia di Era Reformasi**, Bagian ke-4 dalam Indonesia Media , <http://www.indonesiamedia.com/2008/7/early/opini/partisipasi,htm> (diakses 3 April 2010)

Budi Susetyo, **Krisis Identitas Etnis Cina di Indonesia dalam Indonesia Media**, <http://>

- www.unika.ac.id/fakultas/psikologi/artikel/bs-1.pdf
- Boni Hergens, Empat Ciri Politik Indonesia, media Indonesia http://www.unisosderm.org/article_detail.php?aid=7625&coid=3&caid=3&gid=3
- Christinne Susanna Thjin, **Partisipasi Politik Tionghoa dan Demokrasi**, media Indonesia, http://groups.yahoo.com/group/budaya_tionghoa/message/6916
- Edi Lembong, dkk, 2002, **Tugas dan Kewajiban Etnis Tionghoa Dalam Membangun Bangsa dan Negara**, Perhimpunan INTI, Cetakan Pertama, Jakarta
- Eka Hendry, dkk, 2006, **Prasangka Antar Kelompok Etnis di Kalimantan Barat**. STAIN Press, Pontianak
- Peran Politik Etnis Tionghoa: Kasus di Kalimantan Barat**, Media Pontianak, <http://caireu-mediasipontianak.com/main.php?op=informas&sub=informasi=1&mode=detail&id>
- Elvian, **Peran Politik Etnis Cina di Bangka di Era Desentralisasi**, Media Indonesia (diakses 12 September 2009)
- Ferdian Andi.R, **Bangkitnya Kesadaran Politik Tionghoa**, media Indonesia (diakses 18 Pebruari 2009)
- Iqbal Djajadi, **Kekerasan Etnik dan Perdamaian Etnik: Dinamika Relasi Sosial di Antara Dayak Melayu, Cina dan Madura di Kalimantan Barat** . <http://www.conflictrecovery.org/iqbal.doc>. diakses 27 Juli 2008.
- Iskandar Yusuf, **Partisipasi Politik WNI Etnis Tionghoa**, Media Indonesia (diakses 18 Pebruari 2009)
- I. Wibowo, 2001, **Harga Yang Harus Dibayar (Sketsa Pergulatan Etnis Cina di Indonesia)**, PT. Gramedia Utama bekerja sama dengan Pusat Studi Cina, Jakarta
- Justian Suhandinata, 2009, **Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa dalam Stabilitas Ekonomi dan Politik Indonesia**, PT Gramedia Utama Jakarta
- Lisa Suroso, 2008, **Jelang Pemilu 2009, Melirik Potensi Terpendam**. Diakses dari <http://id.inti.or.id/pusatdata/15/tahun/2008>.
- Liong Hesselning, **Etnis Tionghoa Indonesai di Era Reformasi**, media Indonesia, (diakses 29 Juli 2009)
- Masad Masrur, **Demokrasi dan Partisipasi Pembangunan Politik di Indonesia**, Media Indonesia (diakses tanggal 2 September 2009)
- Mely.G.Tan, 2008, **Etnis Tionghoa di Indonesia**, Kumpulan Tulisan , Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Revli Mandagie, **Budaya Tionghoa : Etnis Tionghoa dalam Perjalanan Perpolitikan di Indonesia**, Media Indonesia,
- http://www.mail-archive.com/budaya_tionghoa@yahoogroups.com/msg29254.html (diakses 2 April 2009)
- Suryadinata,L, 1990, **Mencari Identitas Nasional: Dari Tjoe Bou San Sampai Yap Thiam Hien**, Jakarta LP3ES
- Thung Ju Lian, (dalam Hadi Purnomo), **Konflik Etnis yang Tak Kunjung Selesai**, MediaIndonesia, <http://share.ciputra.ac.id/Student?GSB/ISBD/moduls/008%20UC%20MASALAH%20CINA.doc>.
- Yuan Wang, Rob Goodfellow, Xin Sheng Zhang, 2000, **Menembus Pasar Cina**, KPG (kepuustakaan Populer Gramedia, Jakarta
- X-URL:<http://www.tempo.co.ic/majalah/index-isi.asp?rubrik=mon&nomo=1> Nomor.20/XXVII/14 Pebruari 1999 (diakses September 2009)
- <http://gerakanindonesiabarublogspot.com/2009/02/diskriminasi-terhadap-etnis-tionghoa.ht>

'Gerakan Indonesai Baru' (diakses 19 Januari 2010)

[http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2009/12/01/90049/Premanisme. Politik.d...](http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2009/12/01/90049/Premanisme.Politik.d...)
(diakses 21 Januari 2010)